

RINGKASAN

HAMDONO SARI, Program Study Magister Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* Pasir Putih Nusakambangan". Komisi pembimbing, Ketua: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Anggota Dr. Angkasa, SH., M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1). Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum kepada narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* Pasir Putih Nusakambangan. (2) Mengetahui dan menganalisis kendala hukum dalam pelaksanaan perlindungan hukum di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* Pasir Putih Nusakambangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research*). Narasumber yang diteliti adalah petugas dan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* Pasir Putih Nusakambangan. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : Pelaksanaan perlindungan hukum narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan *High Risk* Pasir Putih Nusakambangan terlaksana berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Pasal 14 meliputi hak untuk melakukan ibadah sesuai agama, mendapat perawatan rohani dan jasmani, mendapat pendidikan dan pengajaran, mendapat pelayanan kesehatan serta makanan yang layak, dan mendapatkan bahan bacaan.

Hambatan pelaksanaan perlindungan hukum narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan *high risk* pasir putih nusakambangan dari sudut pandang struktur hukum yaitu petugas lembaga pemasyarakatan yang jumlahnya masih kurang, saat ini petugas lapas berjumlah 97 (Sembilan puluh tujuh) petugas, sedangkan jumlah ideal petugas lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana resiko tinggi (*high risk*) kategori teroris berjumlah 245 (dua ratus empat puluh lima) petugas. Sehingga masih ada kekurangan 148 (seratus empat puluh delapan) petugas.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Narapidana Teroris, Lembaga Pemasyarakatan *High Risk*

SUMMARY

HAMDONO SARI, *Master Of Law Study Program, University Of Jenderal Soedirman, implementation of legal protection to terrorist convicts at the nusakambangan high risk pasir putih correctional institution. Supervising commission, chairman: Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. Member: Dr. Angkasa, SH., M.Hum.*

This research aims to: (1). Knowing and analyzing the , implementation of legal protection to terrorist convicts at the nusakambangan pasir putih high risk correctional institution (2). Knowing and analyzing problem of implementation of legal protection to terrorist convicts at the nusakambangan pasir putih high risk correctional institution. This research is a descriptive study using a sociological juridical approach (socio legal research). The resource persons studied were officers and terrorist convicts at the at the Nusakambangan High Risk Pasir Putih High Risk correctional institution. Collecting data using interview methods and literature study.

Based on the results of research and discussion, concluded as follows: (1). implementation of legal protection to terrorist convicts at the nusakambangan pasir putih high risk correctional institution based on constitution of the republic Indonesia no. 12 of 1995 in article 14 include the right to worship according to religion, receive spiritual and physical care, education and teaching, health services, proper food, and reaing material.

problem of implementation of legal protection to terrorist convicts at the nusakambangan pasir putih high risk correctional institution is the number of correctional officers is still lacking. Currently, there are 97 (Ninety-seven) officers. while the ideal number of correctional officers specifically for high-risk terrorist inmates amounted to 245 (two hundred and forty five) officers. So there is still a shortage of 148 (one hundred and forty eight) officers.

Keywords: Legal Protection, Terrorist Convicts, Correctional Revitalization